

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 1 Januari 2001, otonomi daerah telah dilaksanakan secara efektif. Sebagaimana yang dimuat dalam UU Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tentang otonomi daerah tersebut, telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Karena itu otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah yang dipandang sangat demokratis dan telah memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan. Otonomi daerah bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan, berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Abdul Halim, 2002b).

Berdasarkan Kepmendagri No. 29/2002 menyatakan bahwa untuk tujuan akuntabilitas atas pengelolaan dana yang dikelolanya, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat yang meliputi : (1) neraca daerah menunjukkan posisi keuangan pemerintah daerah pada tanggal

tertentu, (2) laporan perhitungan APBD memuat informasi tentang kinerja keuangan pemerintah daerah selama periode anggaran tertentu, meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan (3) laporan aliran kas menyajikan informasi mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan dan menggunakan kas dari aktivitas yang dilakukan, meliputi operasi, investasi dan pendanaan.

UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah, antara lain berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Dana perimbangan tersebut berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK). Di samping dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, daerah juga mempunyai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan daerahnya yang diperoleh melalui pendapatan asli daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, pajak dari BUMD dan lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan kemandirian daerah dapat diwujudkan dan dimanifestasikan lewat struktur pendapatan asli daerah (PAD) yang kuat.

Namun pada kenyataannya karakteristik daerah di Indonesia sangat beraneka ragam. Terdapat daerah yang dianugerahi kekayaan alam yang sangat melimpah. Terdapat pula daerah yang tidak memiliki kekayaan alam yang besar namun karena struktur perekonomian mereka telah tertata dengan baik maka potensi pajak dapat dioptimalkan sehingga daerah tersebut menjadi

kaya (Abdul Halim, 2002a). Namun masih ada juga daerah yang benar-benar miskin dan struktur perekonomian yang tertinggal, untuk itu transfer dari pemerintah pusat atau DAU masih diberikan khususnya untuk mengatasi kesenjangan antar daerah itu, serta untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh daerah (Simanjuntak, 2002). Karena alasan inilah membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana **PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH KOTA/KABUPATEN DI JAWA TIMUR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah kota/kabupaten di Jawa Timur?
2. Apakah terjadi *flypaper effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah kota/kabupaten di Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa :

1. Dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah kota/kabupaten di Jawa Timur.

2. Terjadi *flypaper effect* pada pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah daerah kota/kabupaten di Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai pengaruh pendapatan-pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah seperti dana alokasi umum (DAU) maupun dari pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri terhadap belanja daerah.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam 5 bab yaitu terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini secara garis besar memberi gambaran tentang teori-teori yang berhubungan dengan teori belanja daerah, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan pajak daerah

serta teori-teori lain yang mendukung penelitian ini; pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah pemerintah kota di Jawa Timur, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB IV : ANALISIS DATA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil dari pengolahan data dan akan diberikan analisis mengenai hasil penelitian tersebut, serta pembahasan.

BAB V : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai simpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian mendatang.

istemi ka per alisa laporan skripsi